

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah telah menjadi isu dalam rangka pembangunan khususnya di daerah, hal ini karena sampah belum ditangani secara baik. Saat ini sampah ditangani oleh Pemerintah Daerah dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Sehingga penanganan sampah tidak dapat optimal dilakukan. Keterbatasan ini diantaranya minimnya sarana dan prasarana, teknologi pengolahan, mekanisme pengelolaan serta masih banyak masalah terutama terhadap lingkungan. Salah satunya masalah dengan lingkungan meningkatnya sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menimbulkan masalah keterbatasan lahan TPA dan biaya pemrosesan sampah di TPA semakin besar.

Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 16 Kecamatan dengan ibukota di Kecamatan Rambah saat ini sedang melakukan pembangunan dan penataan kota. Hal ini terlihat dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Paradigma pengelolaan sampah pada awalnya hanya terbatas pada kumpul - angkut - buang. Dari sisi waktu pengelolaan dengan pendekatan ini relatif cepat karena hanya melalui 3 tahapan akan tetapi tidak efisien. Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja

daerah. Sehingga merupakan bagian yang wajib untuk daerah menganggarkan dalam APBD untuk biaya pengelolaan sampah melihat kondisi yang ada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu setiap tahun telah mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah.

Secara formal pembiayaan pengelolaan sampah telah terpenuhi akan tetapi secara pemenuhan kebutuhan belum mencukupi. Secara umum alokasi pembiayaan untuk sektor persampahan masih dibawah 5% dari total anggaran APBD, rendahnya biaya tersebut pada umumnya karena pengelolaan persampahan masih belum menjadi prioritas dan menggunakan pola penanganan sampah yang ala kadarnya tanpa memperhitungkan faktor keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini anggaran pengelolaan sampah masih di bawah 1 % sehingga akan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal. Saat ini berdasarkan DPA Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu anggaran pengelolaan sampah hanya mencukupi untuk biaya operasional bahan bakar sehingga untuk melakukan upaya lainnya tidak memiliki anggaran yang cukup.

Pembiayaan pengelolaan sampah terdiri dari pemasukan yang bersumber dari retribusi yang dikelola oleh dinas tersendiri, dalam SNI 3242-2008 tentang pengelolaan sampah permukiman bahwa pembiayaan harus memperhatikan peningkatan kapasitas pembiayaan untuk menjamin pelayanan dengan pemulihan biaya secara bertahap supaya sistem dan institusi, serta masyarakat dan dunia usaha punya kapasitas cukup untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan untuk warga. Yang terjadi saat ini Kabupaten Rokan Hulu menarik

retribusi kebersihan kepada masyarakat, retribusi diatur dalam peraturan daerah retribusi jasa umum, untuk pemukiman retribusi yang dikenakan rata-rata sebesar Rp. 10.000/bulan dengan pengambilan sampah 1 kali dalam satu minggu. Nilai itu belum dapat menutupi biaya operasional untuk itu dibutuhkan penyesuaian retribusi.

Penyesuaian retribusi harus memperhatikan daya beli masyarakat, karena sesuai dengan SNI 3242-2008 peningkatan pembiayaan harus dapat menjamin peningkatan pelayanan dan juga keberlangsungan pengelolaan sampah. Dengan dukungan masyarakat pemerintah dapat melakukan penyesuaian tarif retribusi yang diikuti dengan peningkatan pelayanan. Oleh karena itu, pembiayaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu baru memenuhi syarat formal dan belum memenuhi unsur kecukupan dalam peningkatan pelayanan pengelolaan sampah. Selain hal tersebut dibutuhkan penggalan sumber-sumber pembiayaan diluar retribusi dan APBD untuk pembiayaan pengelolaan sampah. Berikut Tabel target dan realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Rokan Hulu.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
di Kabupaten Rokan Hulu

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
2011	400.000.000	273.300.000	68,33%
2012	400.000.000	383.644.000	95,91%
2013	400.000.000	384.560.000	96,14%
2014	400.000.000	431.805.000	107,95%

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kab. Rokan Hulu, Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan dari tahun 2011 sampai 2013 tidak pernah mencapai target jumlah yang diharapkan. Tahun 2014 realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mengalami peningkatan dan melebihi target yang ditetapkan. Rata-rata besarnya persentase realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 92,08% setiap tahunnya. Nilai realisasi penerimaan yang masih jauh dari target yang diharapkan merupakan suatu indikasi bahwa sebenarnya ada potensi yang belum digali secara optimal dalam retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan besarnya target yang ditetapkan terlalu kecil dan dalam menetapkan target kurang memperhatikan potensi yang ada.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui rata-rata kenaikan target penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada tahun 2011 realisasi hanya mencapai 68,33%, masih kurang 31,68% lagi yang harus dikejar untuk mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu 27,59% (walaupun realisasi tahun 2012 hanya 95,91%). Pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang kecil yaitu hanya 0,23% (realisasi tahun 2013 hanya 96,14%). Namun pada tahun 2014 kenaikan target penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan lumayan baik jika dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu 11,81% (persentase penerimaan retribusi sudah mencapai 107,95%). Rata-rata besarnya realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp 368.327.250 setiap tahunnya.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun, daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Salah satunya dari penerimaan sektor retribusi daerah yang diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan

perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan. Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Namun pada kenyataan yang ada, beberapa hambatan dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi disinyalir terkendala hal-hal berikut:

1. Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu selama 4 (empat) tahun terakhir (tahun 2011 sampai dengan tahun 2014) masih berkisar pada angka Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), tidak ada peningkatan pencapaian target penerimaan PAD dari sektor pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Berdasarkan data tabel 1.1 terlihat bahwa realisasi penerimaan PAD dari sektor pelayanan persampahan/kebersihan terus mengalami peningkatan yang berarti jumlah penduduk/rumah tangga sebagai objek pungutan retribusi juga meningkat, namun realisasi yang diharapkan belum sepenuhnya optimal terbukti pada tahun 2011

sampai dengan tahun 2013 penerimaan perolehan retribusi PAD nya tidak mencapai 100%.

3. Dugaan sementara terkait retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang tidak mencapai target tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar tagihan retribusi sampah. Masyarakat/rumah tangga/ruko ada kalanya menolak untuk membayar tagihan yang diajukan petugas.

Beberapa faktor yang menyebabkan terkendalanya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu tersebut di upayakan dengan berbagai cara. Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi yang dalam hal ini adalah semua retribusi yang dapat dipungut dari daerah terutama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Pihak pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan bertujuan untuk peningkatan penerimaan daerah yang diperlukan bagi keperluan dana pembangunan yang berasal dari sumber-sumber PAD.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis mencoba menyusun skripsi dengan judul “**Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Sampah di Kabupaten Rokan Hulu**”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian dan latar belakang penelitian diatas, maka perumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di Kabupaten Rokan Hulu”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di Kabupaten Rokan Hulu.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.
2. Diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan bagi pimpinan di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan nantinya penulis mencoba memaparkan sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dikemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Dalam Bab ini dikemukakan mengenai Landasan Teori, Kerangka Konseptual dan Hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang sejauhmana ruang lingkup penelitiannya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, defenisi operasional, instrumen penelitian, teknik analisis data, terakhir disajikan mengenai jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi, hasil penelitian dan pembahasannya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari pemecahan masalah yang dihadapi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design* yang mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization`s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Thoah, 2010:61).

Menurut Siagian (2007:24) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Apabila dicermati bahwa efektivitas kerja pada suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah maka sasarannya tertuju pada proses pelaksanaan dan tingkat keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai itu sendiri. kegiatan yang dimaksud adalah usaha yang dapat

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi tersebut. Istilah efektif (*effektive*) dan (*efficien*) merupakan istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Pada prinsipnya efektivitas individu para anggotanya didalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan peran mereka masing-masing dalam organisasi tersebut.

Menurut Pasolong (2007:4) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Menurut Mahmudi (2005:92) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Wibawa, 2006:92).

Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Pendapat lain juga dinyatakan oleh Susanto, yaitu: “efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Winardi, 2007:156). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti beranggapan bahwa efektivitas bisa tercipta jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi khalayak yang diterpanya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran daripada efektivitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Adapun menurut pendapat Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam bukunya Efektivitas Organisasi menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu:

- a. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
- b. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
- c. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
- d. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;

- e. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
- f. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
- g. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
- h. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
- i. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
- j. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
- k. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
- l. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan (Wibawa, 2003:46-48).

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

2. Ukuran Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang diterapkan dan secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *Outcome* dan *Output* (Mardiasmo, 2009:3).

Sedangkan rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dan dinyatakan dalam persentase (Halim, 2007:234).

Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim (2007:235) efektivitas retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan retribusi yang ditargetkan. Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan Daerah}}$$

Sumber: (Nick Devas dalam Rahmawati (2012:32))

Semakin besar nilai efektivitas berarti semakin tinggi efektivitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan efektivitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Rokan Hulu dapat juga dengan memberikan peringkat atau nilai hasil akhir dengan menggunakan skala peringkat menurut Mahmudi (2007).

Skala peringkat yang digunakan adalah :

- a) Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- b) Hasil perbandingan tingkat pencapaian sama dengan 100% berarti efektif.
- c) Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

Dengan skala peringkat ini dapat juga kita gunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari penerimaan retribusi daerah lainnya yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar diatas mengenai efektivitas, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Nick Devas dalam Rahmawati (2012:32) dalam penelitian ini.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian terhadap masalah efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi sampah antara lain:

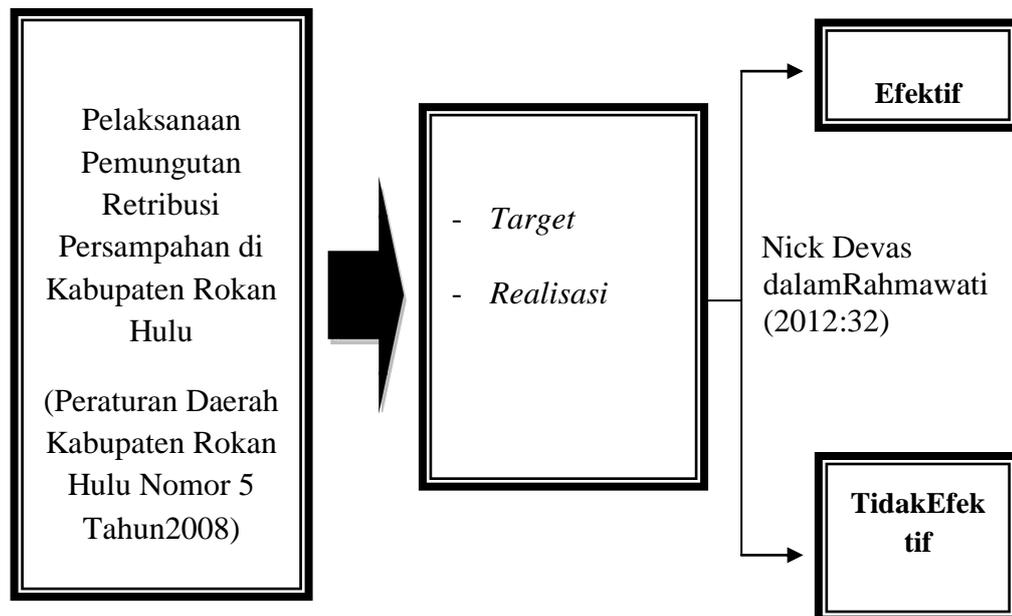
1. Isti Surjandari, dkk (2009), melakukan penelitian dengan judul: Model Dinamis Pengelolaan Sampah Untuk Mengurangi Beban Penumpukan. Hasil penelitian yang didapat yaitu pengelolaan sampah yang dilakukan oleh

pemerintah DKI Jakarta dilakukan dengan pengomposan, yang mempunyai preferensi 53,8%, kelayakan investasi (B/C rasio sebesar 1,41), serta faktor penurunan tumpukan sampah yang cukup tinggi. Kedua adalah dengan *incenerator* dengan nilai *Benefit-Costratio* (B/C) lebih besar dari satu (1,04) maupun efektivitas penurunan timbunan sampah (66%).

2. Farah Wulandari, dkk (2011), yang melakukan penelitian tentang Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang (Studi pada Retribusi Sampah dan Layanan kebersihan). Hasil penelitian memberikan indikasi bahwa DKP Kota Malang telah memiliki strategi yang baik dalam mengantisipasi kelemahan internal dengan memaksimalkan kekuatan internal yang ada (posisi internal yang cukup kuat).
3. Kamalludin, (2013) melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan retribusi sampah masih banyak kendala-kendala sehingga berdampak pada pelayanan penanganan persampahan yakni pelayanan persampahan masih belum optimal, karena keterbatasan kesediaan anggaran (pelayanan persampahan masih 36%); luasnya wilayah Kota Malang, sehingga belum maksimal penanganan sampah, masih relatif sedikit masyarakat yang berperan serta aktif dalam penanganan pengelolaan persampahan.

C. Kerangka Konseptual

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sejauhmana efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi sampah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rokan Hulu. Sebagaimana dapat penulis ilustrasikan berikut ini:



Sumber: *Nick Devas dalam Rahmawati (2012:32)*

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti melalui data yang terkumpul. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di Kabupaten Rokan Hulu tingkat pencapaiannya dibawah 100% yang berarti tidak efektif.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu penggambaran dengan menggunakan tabel, gambar dan sebagainya untuk memberikan penjelasan yang lengkap, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi sampah di Kabupaten Rokan Hulu.

B. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan penulis laksanakan selama empat bulan, terhitung dari bulan 1 Oktober 2015 sampai dengan 30 Januari 2016. Mengingat waktu yang singkat penulis berharap agar waktu yang ada dapat penulis gunakan dengan seefisien mungkin dengan sarana dan prasarana yang ada, namun penulis berharap hasil penelitian yang dapat selesai dengan seoptimal mungkin.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Mengingat metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi maksud sampling dalam hal ini untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan bangunannya

(*constructional*). Maksud kedua dari sampling ialah menggali informasi yang akan menjadi dasar dan rancangan serta teori yang muncul.

Pemilihan informasi sebagai sumber data atau informan dalam penelitian ini berdasarkan asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi kriteria. Kriteria memilih informan sebagai narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah Sampel	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin
1.	Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya	1 Orang	Pascasarjana (S2)	Laki-laki
2.	Kepala Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman	1 Orang	Sarjana (S1)	Laki-laki
3.	Kepala Seksi Kebersihan	1 Orang	Sarjana (S1)	Laki-laki
4.	Camat Rambah	1 Orang	Sarjana (S1)	Laki-laki
5.	Lurah Pasir Pengaraian	1 Orang	Sarjana (S1)	Laki-laki
6.	Petugas Pemungut Retribusi Sampah	5 Orang	SLTA	Laki-laki
7.	Masyarakat/ pelanggan tetap pemungutan Retribusi sampah	20 Orang	Sarjana= 7 SLTA = 12 SLTP = 1	Laki-laki=13 Perempuan = 7

Sumber: Hasil Observasi Penulis, Tahun 2016

Setelah dalam proses pengumpulan data tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak mencari informasi baru, proses pengumpulan informasi dianggap selesai. Dengan demikian penelitian kualitatif tidak

dipersoalkan jumlah informan, tetapi juga bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif.

- a. Data kuantitatif, yaitu data-data berbentuk angka yang diperoleh dari dinas instansi terkait yang berkaitan dengan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber retribusi persampahan/kebersihan.
- b. Data kualitatif, yaitu uraian-uraian kalimat yang diperoleh berupa informasi penelitian melalui kegiatan wawancara dengan responden penelitian terpilih.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibedakan atas:

- b. Data Primer adalah data yang penulis peroleh dari hasil penelitian langsung dari tanggapan responden melalui kuisisioner yang diberikan mengenai Efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi sampah.
- c. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh dalam bentuk data yang sudah tersedia yang diperoleh pada kantor Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu.

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu dengan:

1. Studi Dokumentasi

Yaitu kegiatan pengumpulan data yang bersumber dari dokumen, peraturan, dan referensi lain yang relevan dengan bidang kajian yang sedang diteliti.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. (Mulyana; 2006;180). Penulis mendatangi responden guna mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan, membawa serta daftar pertanyaan yang akan diisi dengan keterangan-keterangan hasil wawancara. Penulis pengajuan daftar pertanyaan secara lisan kepada responden terpilih yaitu pimpinan dan pegawai untuk mendapatkan data mengenai efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi sampah.

3. Observasi

Adalah bentuk penelitian yang dilakukan secara berulang kali sehingga menemukan hasil yang cocok dan relevan terhadap hasil penelitian yang diinginkan.

F. Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas retribusi daerah adalah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan retribusi sampah dengan target penerimaan retribusi sampah. Efektivitas retribusi sampah dapat diukur dengan menggunakan rumus, dapat diukur dengan metode pengukuran yang ditetapkan, yaitu:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}}$$

Sumber: (Nick Devas dalam Rahmawati(2012:32)

Semakin besar nilai efektivitas berarti semakin tinggi efektivitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Rokan Hulu.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan efektivitas penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Rokan Hulu dapat juga dengan memberikan peringkat atau nilai hasil akhir dengan menggunakan skala peringkat menurut Mahmudi (2007).

Skala peringkat yang digunakan adalah :

- a) Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- b) Hasil perbandingan tingkat pencapaian sama dengan 100% berarti efektif.
- c) Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

Dengan skala peringkat ini dapat juga kita gunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari penerimaan retribusi daerah lainnya yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.